

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Alvin A. Arens, Rendal J. Elder, Mark S. Beasley dalam Herman Wibowo (2008:4) mendefinisikan akuntansi adalah sebagai berikut:

“Pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan”.

Menurut Simamora, Henry (2002:7) mendefinisikan bahwa akuntansi adalah sebagai berikut:

“Metode Akuntansi melibatkan pengidentifikasian kejadian dan transaksi yang berimbas terhadap entitas, begitu diidentifikasi, unsur-unsur tersebut diukur, dicatat, diklasifikasikan dan diragukan dalam catatan akuntansi”.

Menurut Guy dan M., C. Wayne Alderman dan Alan J. Winters (2002:9) mendefinisikan tujuan umum akuntansi adalah sebagai berikut:

“Menyediakan informasi keuangan mengenai entitas ekonomi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi berkaitan dengan proses pengidentifikasian, penganalisaan, pengukuran dan

kemudian mengubah data dalam bentuk catatan akuntansi yang tujuan akhirnya diharapkan memperoleh informasi keuangan yang relevan dan andal sehingga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

2.1.2 Audit

2.1.2.1 Pengertian Audit

Alvin A. Arens, Rendal J. Elder, Mark S. Beasley dalam Hermawan Wibowo (2008:4) mendefinisikan auditing adalah sebagai berikut:

“Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) mendefinisikan auditing adalah sebagai berikut:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Berdasarkan definisi tersebut bahwa auditing harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kinerja yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.1.2.2 Jenis-jenis Audit

Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa jenis audit menurut ahli.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:10) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

- “1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan *auditee* yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:9) ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

- “1. Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Elektronic Data Processing (EDP)*”.

Dari uraian tersebut, jenis-jenis audit dapat ditinjau dari luasnya pemeriksaan serta dapat ditinjau dari jenis pemeriksaan tergantung pada kebutuhan pengguna laporan keuangan.

2.1.2.3 Standar Audit

Auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini disebut sebagai Pernyataan Standar Auditing (PSA). Standar tersebut digunakan auditor sebagai pedoman pelaksanaan audit atas laporan keuangan klien.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2011, Standar Auditing Seksi 150, menjelaskan mengenai standar auditing yang terdiri dari:

- “1) Standar Umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
- 2) Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang harus dilakukan.
 - b. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi

sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3) Standar Pelaporan

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disetujui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor harus memuat tanggung jawab yang dipikulnya”.

2.1.2.4 Pengertian Auditor

Suatu aktivitas audit dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang disajikan. Menurut *International Standard of Organization* (19011:2002) auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) tentang auditor, audit dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah independensi, integritas dan kompetensi. Dua kriteria yang pertama lebih bersifat kualitatif, sehingga sulit untuk mengukurnya. Sebaliknya,

kompetensi lebih nyata dan dapat kita telaah sejauh mana seseorang dapat dikategorikan kompeten.

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Untuk memperoleh kompetensi tersebut, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor yang dikenal dengan nama pendidikan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*). Ada beberapa komponen dari kompetensi auditor, yakni: mutu profesional, pengetahuan umum dan keahlian khusus.

Dalam menjelaskan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu profesional yang baik, mutu profesional seorang auditor yaitu:

1. Berpikiran terbuka (*open minded*);
2. Berpikiran luas (*broad minded*);
3. Mampu menangani ketidakpastian;
4. Mampu bekerjasama dalam tim;
5. Rasa ingin tahu (*inquisitive*);
6. Mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah;
7. Menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif.

Disamping itu, auditor juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena selama masa pemeriksaan banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditan untuk memperoleh data.

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analitis (*analytical review*),

pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing dan pengetahuan tentang sektor publik. Yang tidak boleh dilupakan, adalah pengetahuan akuntansi untuk membantu dalam memahami siklus entitas dan laporan keuangan serta mengolah data dan angka yang diperiksa.

Keahlian khusus yang harus dimiliki seorang auditor antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan mengoperasikan komputer serta kemampuan menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor merupakan orang yang sangat memegang peranan penting dalam aktivitas audit dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan audit sesuai dengan standar profesionalnya (<http://scribd.com/doc/Pengertian-Auditor>).

2.1.2.5 Jenis-jenis Auditor

Menurut Rendal J.Elder, Mark S.Beasley, Alvin A.Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2011:19) mengklasifikasikan jenis-jenis auditor menjadi empat, yaitu:

“1. Akuntan Publik Terdaftar

Auditor ekstern atau independen bekerja untuk Kantor Akuntan Publik yang statusnya di luar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan atas *financial audit* yang dibuat oleh kliennya. Auditor tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor dan instansi pemerintah.

2. Auditor Pemerintah

Tugas auditor pemerintah adalah untuk menilai kewajaran atas laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah. Di samping itu audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Dan sering juga audit atas ketaatan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Audit yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

3. Auditor Pajak

Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.

4. Auditor Internal

Auditor internal bekerja untuk perusahaan yang mereka audit di mana tugas pokoknya (Auditor Internal) adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi”.

2.1.3 Kompetensi

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi

Standar umum pertama (IAI, 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Betapapun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:146) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/ pengetahuan (*Knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya”.

Menurut Alvin A. Arens et. All (2013:42) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibanding auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan professional yang berkelanjutan”.

Menurut Fitrawansyah (2014:46) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi artinya auditor harus memiliki keahlian dibidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya”

Menurut Iskandar Indranata (2006:36) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Keseluruhan pengetahuan, kemampuan/keterampilan dan sikap kerja ditambah atribut kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang mencakup kemampuan berfikir kreatif, keluasan pengetahuan, kecerdasan emosional, pengalaman, daya juang, sikap positif, keterampilan kerja serta kondisi kesehatan yang baik yang bisa dibuktikan atau diperagakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya”.

Menurut Mc Acshan dalam Edy Sutrisno (2010:203) memberikan pengertian kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi adalah Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga

ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya”.

Menurut Tuanakotta (2011), kompetensi merupakan keahlian seorang auditor diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor. Pada awal lahirnya profesi ini, persyaratannya masih sederhana. Dengan berkembang dan kemajuan ilmu pengetahuan dan semakin kompleksnya dunia usaha, persyaratan menjadi auditor akan semakin ketat. Christiawan (2002) dan Alim, Hapsari, Purwanti (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Pengelolaan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan, pengalaman dan pelatihan merupakan investasi yang mahal, tetapi sangat menentukan. KAP peringkat teratas mengeluarkan banyak sumber daya (uang dan waktu) untuk meningkatkan kemahiran auditornya, artinya dalam melaksanakan audi diperlukan sikap kompeten dimana didalamnya harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan.

2.1.3.2 Sudut Pandang Kompetensi

Menurut De Angelo (1981) dalam Law Tjun Tjun (2012) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni:

1. Sudut pandang auditor individual
2. Sudut pandang audit tim
3. Sudut pandang Kantor Akuntan Publik (KAP)

Masing-masing sudut pandang akan dibahas mendetail berikut ini:

1. Kompetensi Auditor Individual

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990) bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.

2. Kompetensi Audit Tim

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit (Wooten, 2003). Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

3. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP menurut Deis&Giroux (1992) diukur dari jumlah klien dan prosentse dari *audit fee* dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. Berbagai penelitian (missal De Angelo 1981, Davidson dan Neu 1993, Dye 1993, Becker et.al. 1998, Lennox 1999) menemukan hubungan positif antara besaran KAP dan kualitas audit. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien (De Angelo, 1981). Selain itu KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit dari pada KAP kecil.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kompetensi dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi dari sudut auditor individual, hal ini dikarenakan auditor adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

2.1.3.3 Dimensi Kompetensi Auditor

Menurut I Gusti Agung Rai (2008: 63) terdapat 3 macam komponen kompetensi auditor yaitu:

1. Mutu personal

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:

- a. Rasa ingin tahu (*inquisitive*)
- b. Berpikir luas (*broad minded*)
- c. Mampu menangani ketidak pastian
- d. Mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah
- e. Menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif
- f. Mampu bekerja sama dengan tim

2. Pengetahuan umum

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang akan diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan *review* analisis (*analytical review*), pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sektor publik. Pengetahuan akuntansi mungkin akan membantu dalam mengolah angka dan data, namun karena audit kinerja tidak memfokuskan pada laporan keuangan maka pengetahuan akuntansi bukanlah syarat utama dalam melakukan audit kinerja.

3. Keahlian khusus

Keahlian khusus yang harus dimiliki antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan menggunakan computer (minimal mampu mengoperasikan *word processing* dan *spread sheet*). Serta mampu menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

2.1.3.4 Jenis - Jenis Kompetensi

Menurut Armstrong dan Murlis dalam Ramelan (2008:56), kompetensi itu ada dua yaitu kompetensi inti dan kompetensi generic atau kompetensi khusus.

1. Kompetensi Inti

Kompetensi inti adalah hal-hal yang harus dilakukan organisasi dan orang yang ada didalamnya agar bisa berhasil. Kompetensi inti ini merupakan hasil dari pembelajaran kolektif dalam organisasi. Mereka mengatakan bahwa kompetensi inti adalah komunikasi, keterlibatan dan komitmen mendalam untuk bekerja dalam organisasi.

2. Kompetensi Generik

Kompetensi generik adalah kompetensi yang berlaku untuk kategori karyawan tertentu, seperti manajer, pemimpin tim, teknisi desain, manajer cabang, spesialis kepersonaliaan, akuntan, operator mesin, asisten penjualan atau sekretaris, sebagai contoh, kompetensi generik manajer cabang bisa mencakup kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian., pengembangan bisnis, hubungan pelanggan, keputusan komersial, keterampilan komunikasi dan hubungan antar pribadi. kompetensi generik bisa ditetapkan untuk kelompok jabatan

yang secara fundamental sifat-sifat tugasnya sama, tetapi level pekerjaan yang ditangani berbeda-beda.

2.1.4 Akuntabilitas

2.1.4.1 Definisi Akuntabilitas

Kantor akuntan publik dituntut untuk lebih akuntabel dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Tanpa adanya prinsip akuntabilitas maka kesimpulan yang dibuat tidak dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai laporan keuangan perusahaan/instansi berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan.

Pengertian akuntabilitas secara umum menurut Mardiasmo (2006:3) adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas merupakan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.”

Menurut Tetclock (1987) dalam Mardisar. D dan R. Nelly Sari (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas merupakan bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi.

Akuntabilitas auditor merupakan kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang

telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Dalam konteks ini, pengertian akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja (Ainia dan Prayudiawan, 2011).

Sedangkan menurut Supardi dan Mutakin (2008) menyatakan bahwa rasa tanggung jawab atau akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dirasakan oleh auditor bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan standar akuntan publik sehingga dapat dipertanggungjawabkan mengenai kesimpulan yang dibuat untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah keadaan dimana seseorang mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan. Auditor bertanggungjawab terhadap hasil penilaian bukti-bukti audit yang diberikan klien, sehingga hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh klien. Jika auditor memiliki akuntabilitas yang tinggi, maka hasil audit akan berkualitas.

2.1.4.2 Bentuk-bentuk Akuntabilitas

2.1.4.2.1 Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2006:21) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

- “1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)
Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas kegiatan kepada pihak-pihak yang lebih tinggi kedudukannya.
2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat”.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*).

2.1.4.2.2 Akuntabilitas Auditor

Akuntabilitas merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang auditor. Peran dan tanggung jawab diatur dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) (2011:305-306) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ataupun Statement on Auditing Standards (SAS) yang dikeluarkan oleh Auditing Standards Boards (ASB). Peran dan tanggung jawab auditor adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (fraud), kekeliruan dan ketidakberesan.

Dalam SPAP (seksi 316) pendeteksian terhadap kekeliruan dan ketidakberesan dapat berupa kekeliruan dan pengumpulan dan pengolahan data akuntansi, kesalahan estimasi akuntansi, kesalahan penafsiran prinsip akuntansi tentang jumlah, klasifikasi dan cara penyajian, penyajian laporan keuangan yang menyesatkan serta penyalahgunaan aktiva.

2. Tanggung jawab sikap independensi dan menghindari konflik.

SPAP (Seksi 220) harus bersikap jujur, bebas dari kewajiban klien dan tidak mempunyai kepentingan dengan klien baik terhadap manajemen maupun pemilik.

3. Tanggung jawab mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang sifat dan hasil proses audit.

SPAP (Seksi 341) menyatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup perusahaan, auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Bila ternyata tidak memuaskan, auditor boleh tidak memberikan pendapat dan perlu diungkapkan.

4. Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien.

SPAP (Seksi 317) memberikan arti penting tentang pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan oleh satuan usaha yang laporan keuangannya diaudit. Penentuan pelanggaran tersebut bukan kompetensi auditor tetapi hasil penilaian ahli hukum. Indikasinya adalah pengaruh langsung yang material terhadap laporan keuangan sehingga auditor melakukan prosedur audit yang dirancang khusus agar diperoleh keyakinan memadai apakah pelanggaran hukum telah dilakukan.

2.1.4.3 Dimensi Akuntabilitas

Aspek-aspek yang mendukung timbulnya prinsip akuntabilitas menurut Robbins (2008) dalam Elisha dan Icuk (2010) dapat dilihat dari motivasi, pengabdian pada profesi, dan kewajiban sosial. Berikut penjelasannya yaitu:

1. Motivasi

Motivasi adalah dorongan pada diri seseorang yang menimbulkan suatu keinginan untuk melakukan suatu tindakan atau tingkah laku untuk

mencapai tujuan. Auditor yang berkualitas memiliki motivasi yang tinggi. Dengan motivasi yang tinggi, seorang auditor akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sehingga menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

Meurut Robbins (2008:222) Elemen utama dalam motivasi adalah:

- a. Intensitas, berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha.
- b. Ketekunan, ukuran mengenai berapa lama seseorang mempertahankan usahanya.

2. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi seorang auditor merupakan dedikasi auditor terhadap pekerjaannya yang dilakukan secara profesional dan total dengan menggunakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Profesional dan totalitas pekerjaan tidak memprioritaskan materi. Menurut Robbins (2008) dalam Elisha dan Icut (2010), pengabdian kepada profesi merupakan suatu komitmen yang terbentuk dari dalam diri seseorang profesional, tanpa paksaan dari siapapun, dan secara sadar bertanggung jawab terhadap profesinya.

Indikator pengabdian terhadap profesi dalam IAI:

- a. Tanggung jawab profesi.

Prinsip tanggung jawab profesi menyatakan bahwa sebagai profesional, anggota IAI mempunyai peranan penting dalam masyarakat terutama kepada semua pemakai jasa profesional

merekadan bertanggung jawab dalam mengembangkan profesi akuntansi.

- b. Penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan.
- c. Menjalankan setiap program kegiatan profesi

Setiap anggota profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan seni akuntansi serta mengadakan dan menjalankan setiap program dan kegiatan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan profesi.

3. Kewajiban Sosial

Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun professional karena adanya pekerjaan tersebut.

Dari definisi tersebut didapatkan indikator kewajiban sosial bagi auditor yaitu:

- a. Pelayanan kepentingan publik

Prinsip kepentingan publik menyatakan bahwa setiap anggota berkewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

- b. Integritas

Prinsip integritas mengakui integritas sebagai kualitas yang dibutuhkan untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik.

c. Menjaga kepercayaan publik terhadap profesi

Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Audit

Rendal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dalam Amir Abadi (2011:47) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya”.

Elisha Muliani Singgih dan Icuk Rangga Bawono (2010) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku”.

Webster's New International Dictionary dalam Mulyadi (2013:16) menjelaskan bahwa:

“Standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing”.

Menurut Nasrullah Djamil (2005) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Kualitas melalui sejumlah unit standarisasi dari bukti audit yang diperoleh oleh auditor eksternal dan kegagalan audit dinyatakan juga sebagai kegagalan auditor independen untuk mendeteksi suatu kesalahan material. Untuk meningkatkan kualitas audit maka harus memperhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit”.

Gaspersz yang dikutip oleh L. Fariha, U. Nurmaida, D. Askanovi, R. Aditya dan V. M. Amalia dalam Buletin Manajemen Mutu dan Industri Pangan (2011) mendefinisikan kualitas adalah sebagai berikut:

“Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan”.

Seorang auditor harus memiliki kualitas audit agar hasil laporan keuangan yang menjadi maksimal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Agar hasil audit lebih berkualitas, Indra Bastian (2007:186) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Bahwa kualitas audit harus dimulai dari melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum mulai melaksanakan pemeriksaan dan menggunakan keahlian serta kecermatan dalam menjalankan profesinya”.

De Angelo dalam Kusharyanti (2003) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi), sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor”.

Agar tidak keliru menafsirkannya, maka perlu meninjau definisi kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti yang dikutip dalam R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto (2006:314) mendefinisikan kualitas adalah sebagai berikut:

“Kadar, mutu, tingkat baik buruknya suatu (tentang barang dsb), tingkat derajat atau taraf kepandaian, kecakapan dsb”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas terkait dengan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dalam hal ini yaitu laporan audit. Profesi akuntan publik sebagai pihak yang independen yang dikenal oleh masyarakat harus mampu menghasilkan jasa audit yang berkualitas, maka auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang mereka dapatkan dari klien, para pengambil keputusan dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas audit ini auditor harus memperhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit sesuai dengan standar yang berlaku.

2.1.5.2 Dimensi Kualitas Audit

Nasrullah Djamil (2009) menjelaskan kualitas audit terdiri dari empat dimensi yang terbagi menjadi beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

“1. Kemampuan auditor, indikatornya adalah:

- (a) Mengidentifikasi kesalahan.
- (b) Menghasilkan laporan audit yang akurat.
- 2. Objektivitas, indikatornya adalah:
 - (a) Jujur secara intelektual.
 - (b) Tidak memihak.
 - (c) Bebas dari konflik kepentingan.
- 3. Independensi, indikatornya adalah:
 - (a) Tidak mempunyai kepentingan pribadi.
 - (b) Bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas.
- 4. Standar Auditing, indikatornya adalah:
 - (a) Standar Umum.
 - (b) Standar Pelaksanaan.
 - (c) Standar Pelaporan”.

. Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI, dalam hal ini adalah standar auditing.

- “1. Standar umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya profesionalnya dengan cermat dan seksama.
- 2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
- 3. Standar Pelaporan
 - a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- b. Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika, ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip kuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
- c. Pengungkapan informatifve dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat tanggung jawab yang dipikulnya”.

Standar-standar tersebut dalam banyak hal saling berhubungan satu sama lain. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. Sistem pengendalian kualitas sendiri memiliki keterbatasan yang dapat berpengaruh efektivitas.

2.1.5.3 Standar Pengendalian Kualitas Audit

Bagi suatu kantor akuntan publik, pengendalian kualitas dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor akuntan publik telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien maupun pihak lain.

Menurut Randal J.Elder, Mark S.Beasley, Alvin A.Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2011:48) menjelaskan bahwa terdapat lima elemen pengendalian kualitas, yaitu:

“1. Independensi, Integritas dan Objektivitas

Semua fenomena yang terlibat dalam penugasan harus mempertahankan independensi baik secara fakta maupun secara penampilan, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggungjawab profesionalnya.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam kantor akuntan publik, kebijakan dan prosedur harus disusun supaya dapat memberikan tingkat keandalan tertentu bahwa:

- a. Semua karyawan harus memiliki kualifikasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara kompeten.
- b. Pekerjaan kepada mereka yang telah mendapatkan pelatihan teknis secara cukup serta memiliki kecakapan.
- c. Semua karyawan harus berpartisipasi dalam melaksanakan pendidikan profesi sehingga membuat mereka mampu melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.
- d. Karyawan yang dipilih untuk dipromosikan adalah mereka yang memiliki kualifikasi yang diperlukan supaya menjadi bertanggung jawab dalam penyusunan berikutnya.

3. Penerimaan dan Kelanjutan Klien dan Penugasannya

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima klien baru atau meneruskan kerjasama dengan klien yang telah ada. Kebijakan dan prosedur ini harus mampu meminimalkan resiko yang berkaitan dengan klien yang memiliki tingkat integritas manajemen yang rendah.

4. Kinerja Penugasan dan Konsultasi

Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan mutu KAP sendiri.

5. Pemantauan Prosedur

Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif”.

IAPI menjelaskan bahwa pelaksanaan standar auditing akan mempengaruhi kualitas audit, standar auditing tersebut meliputi (SPAP, 2011:150.1):

“A. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

3. Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
- B. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
- C. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor”.

Standar-standar tersebut dalam banyak hal saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain.

Materialitas dan risiko audit melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

2.1.5.4 Langkah-langkah yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Nasrullah Djamil (2005) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah sebagai berikut:

- “1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku

umum atau tidak dan pengungkapan yang informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit”.

2.1.5.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dies dan Giroux (1992) dalam Alim dkk (2007) tentang empat faktor yang dapat mempengaruhi audit, yaitu:

“1. Tenure

Lama waktu audit yang telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tenur), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan semakin rendah.

2. Jumlah klien

Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.

3. Kesehatan keuangan klien

Semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.

4. Review oleh pihak ketiga

Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh orang ketiga”.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Eunike Cristina Elfarini (2007)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor	Variabel Independen: Kompetensi dan Independensi.	Kompetensi dan independensi secara simultan dan parsial berpengaruh

		terhadap Kualitas Audit.	Variabel Dependen: Kualitas Audit.	signifikan terhadap kualitas audit.
2.	Nataline (2007)	Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi, Pemberian Bonus, Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit.	Variabel Independen: Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi, Pemberian Bonus dan Pengalaman Kerja. Variabel Dependen: Kualitas Audit.	Batasan waktu audit, pengetahuan audit, pemberian bonus dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
3.	Sukriah, dkk (2009)	Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi Objektivitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.	Variabel Independen: Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi. Variabel Dependen: Kualitas Hasil Pemeriksaan.	Pengalaman kerja, obyektivitas dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan.
4.	Elisha Muliana Singgih dan Icuk Rangga Bawono (2010)	Pengaruh Independensi, Pengalaman, <i>Due Professional Care</i> , dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit.	Variabel Independen: Independensi, Pengalaman, <i>Due Professional Care</i> dan Akuntabilitas. Variabel Dependen: Kualitas Audit.	Independensi, pengalaman, <i>due professional care</i> dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu secara parsial, independensi, <i>due professional care</i> dan akuntabilitas berpengaruh

				terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
5.	Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari (2007)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor.	Variabel Independen: Akuntabilitas dan Pengetahuan. Variabel Dependen: Kualitas Hasil Kerja Auditor.	Akuntabilitas dan pengetahuan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil kerja auditor.
6.	Inka Dwi Anggraini (2013)	Pengaruh Kompetensi Dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit.	Variabel Independen: Kompetensi dan Akuntabilitas. Variabel Dependen: Kualitas Audit.	Kompetensi dan akuntabilitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu memiliki perbedaan dan persamaan dengan penulis :

1. Eunike Cristina Elfarini (2007) tentang “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit di KAP Jawa Tengah”. Dalam penelitian tersebut objek penelitian yaitu KAP Jawa Tengah sedangkan penulis di KAP Kota Bandung. Variabel bebas dalam penelitian terdahulu adalah kompetensi dan independensi, sedangkan penulis kompetensi dan akuntabilitas. Persamaan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sampel penelitian yang diambil menggunakan teknik *Proporsional Simple Random*

Sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

2. Nataline (2007) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi, Pemberian Bonus, Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit pada KAP”. Variabel independen adalah batasan waktu audit, pengetahuan akuntansi, pemberian bonus, pengalaman kerja sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis, penulis hanya menggunakan kompetensi di variabel bebasnya sedangkan persamaan variabel dalam penelitian terdahulu dengan penulis yaitu kualitas audit di variabel terikatnya.
3. Sukriah, dkk. (2009) juga melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan”. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi. Sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas hasil pemeriksaan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah ada pengurangan variabel di variabel bebas dan persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu menggunakan kompetensi di variabel bebas dan kualitas audit di variabel terikat

4. Elisha Muliani Singgih dan Icut Ranga Bawono (2010) meneliti dengan judul “Pengaruh Independensi, Pengalaman, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi pada KAP “Big Four” di Indonesia)”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu ada pengurangan variabel dan penulis hanya menggunakan akuntabilitas di variabel bebas dan yang menjadi objek penelitian adalah KAP di kota Bandung sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu kualitas audit di variabel terikat
5. Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari (2007) meneliti dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor (Studi pada KAP di Kota Pekanbaru & Padang)”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu objek penelitian penelitian terdahulu objek penelitiannya di KAP Kota Pekanbaru & Padang sedangkan penulis KAP di Kota Bandung sedangkan persamaan Penelitian terdahulu dengan penulis yaitu akuntabilitas di variabel bebas.
6. Inka Dwi Anggraini (2013) meneliti dengan judul “Pengaruh Kompetensi Dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit”. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi dan akuntabilitas sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas audit. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian terdahulu survey pada objek penelitian tahun 2013 sedangkan

penulis tahun 2016 sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu memiliki persamaan di variabel bebas dan variabel terikatnya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas audit.

2.2 Kerangka Pemikiran

Manajemen perusahaan dipercaya dan diberi tanggung jawab untuk mengelola sumberdaya yang diinvestasikan ke dalam perusahaan oleh pemilik perusahaan. Manajemen harus menyusun laporan keuangan secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pemilik perusahaan. Agar laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan akurat dan tidak mengandung salah saji maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh pihak ketiga yaitu auditor eksternal sebelum informasi laporan keuangan tersebut digunakan oleh pemilik dan pemakai laporan keuangan lainnya dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Auditor eksternal adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan antara pihak manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*). Peran auditor dibutuhkan untuk memberikan penilaian tentang kualitas informasi yang tercakup dalam laporan keuangan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor eksternal harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga bagi masyarakat luas. Hal tersebut dapat dicapai jika auditor eksternal memiliki salah

satu elemen penting kendali mutu audit yaitu independensi dan objektivitas (Nor Rasyid Widodo 2012).

Dalam menghasilkan Kualitas Audit yang akurat, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, maka auditor tersebut harus memiliki beberapa sikap sebagai dasar dalam mengambil keputusan kegiatan auditnya. Sikap yang harus dimiliki auditor tersebut antara lain Independensi, Kompetensi dan Akuntabilitas.

Auditor eksternal bergabung dalam Kantor Akuntan Publik dan diberi kepercayaan besar oleh manajemen perusahaan, pemilik perusahaan dan pemakai laporan keuangan lainnya dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan mereka.

Jasa audit atas laporan keuangan yang diselesaikan oleh auditor harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). Standar Profesional Akuntan Publik merupakan standar teknis yang mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Salah satu standar teknis audit tersebut yaitu standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:20) menjelaskan bahwa:

“Audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing”.

Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley dalam Hermawan Wibowo (2008:42) menjelaskan bahwa:

“Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesionalnya seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bukti”.

De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dari pengertian tentang kualitas audit di atas bahwa auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan, untuk dapat menjalankan kewajibannya terdapat dua komponen yang saling terkait dengan kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor.

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai serta keahlian khusus dibidangnya. Menurut Tubbs (1992) dalam Mabruri dan Winarna (2010) menyatakan bahwa dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.2.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor, tanpa adanya sifat akuntabilitas dari auditor maka setiap tugas yang dilaksanakan tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan yang sebenarnya.

Akuntabilitas memiliki suatu pengaruh terhadap tingkat kualitas audit. Menurut Mardiasmo (2002:121) bahwa akuntabilitas memiliki suatu pengaruh terhadap tingkat kinerja seperti yang dinyatakan sebagai berikut ini:

“Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”.

Meisser dan Quilliem dalam Diani Mardisar dan Ria Nelly Sari (2007) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor sebagai berikut:

“Akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat meningkatkan proses kognitif auditor dalam mengambil keputusan”.

Achmad Badjuri (2011) menjelaskan bahwa:

“Semakin auditor menyadari akan tanggungjawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi”.

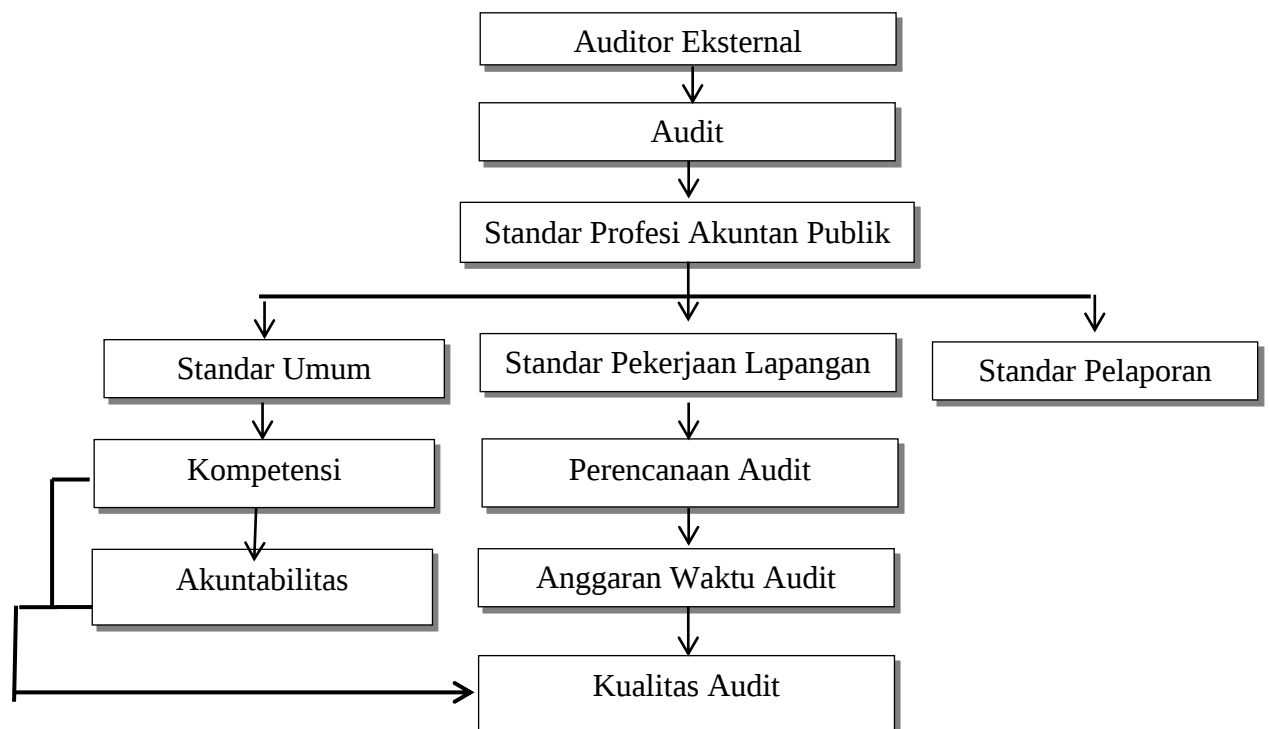
Lilis Ardini (2010) menjelaskan bahwa:

“Tingkat kecermatan yang tinggi dalam memeriksa laporan yang akan diaudit, serta mengerjakan tugas audit seoptimal mungkin dengan penuh tanggungjawab akan menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas”.

2.2.3 Pengaruh Kompetensi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit

Nugrahaningsih (2005) dalam Alim dkk (2007) mengatakan bahwa akuntan memiliki kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi mereka kepada organisasi dimana mereka berlandung, profesi mereka, masyarakat dan pribadi mereka sendiri dimana akuntan mempunyai tanggung jawab menjadi kompeten dan berusaha menjaga integritas dan obyektivitas mereka.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit.



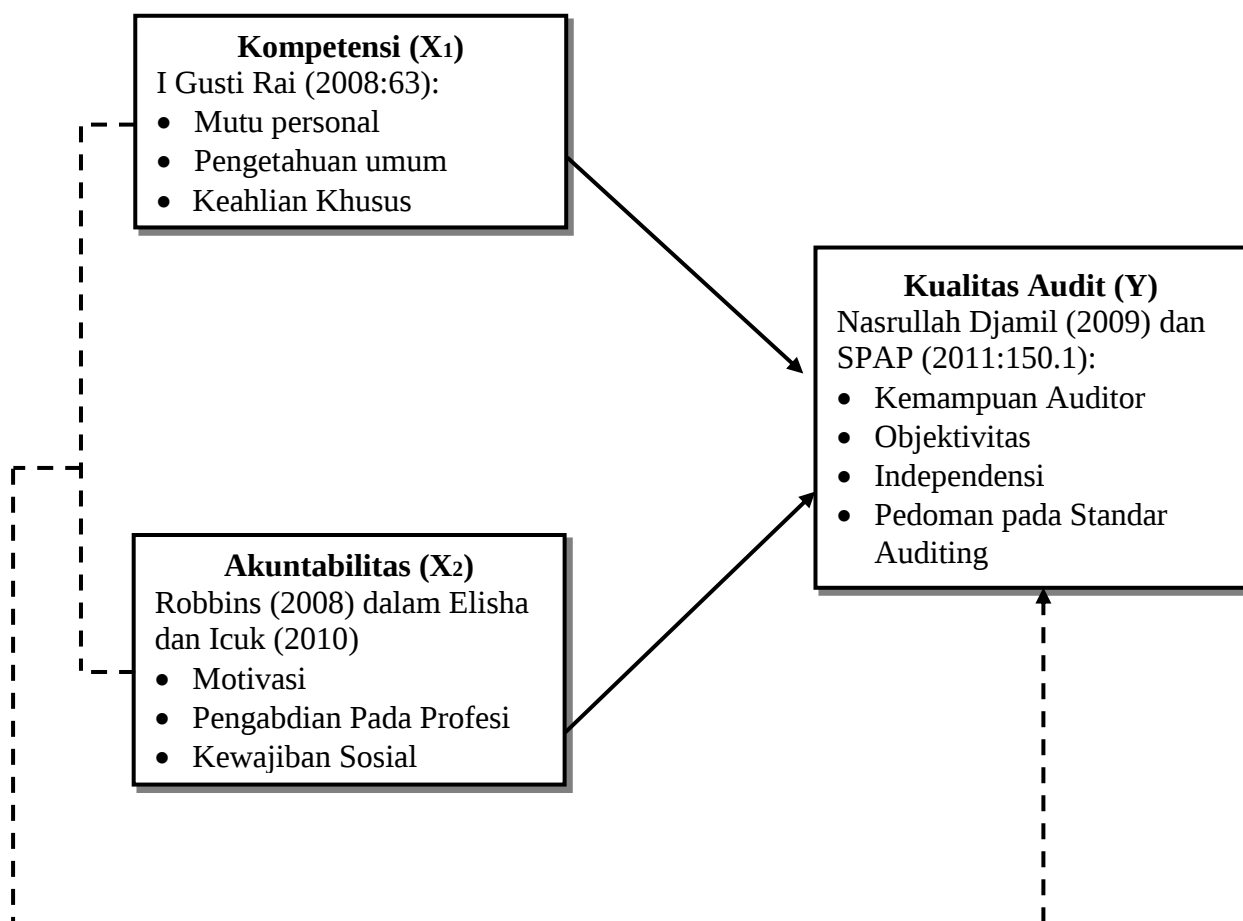
Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Paradigma Penelitian

Dari kerangka diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian, menurut Sugiyono (2013:63) mendefinisikan paradigma penelitian adalah sebagai berikut:

“Pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis jumlah hipotesis dan teknik analisis statistik yang akan digunakan”.

Paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3
Paradigma Penelitian

Keterangan:

—————→ = Pengaruh Parsial
 - - - - -→ = Pengaruh Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat diajukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

- 1: Kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
- 2: Akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
- 3: Kompetensi, dan Akuntabilitas secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.